

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan mengapa judul "*Sikap Amerika Terhadap Konflik Hamas-Fatah di Palestina*" menjadi pilihan judul skripsi ini adalah karena ketertarikan penulis pada permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina antara dua kelompok yang berseteru yaitu kelompok Hamas dan kelompok Fatah. Konflik yang terjadi telah lama ini seakan-akan tidak ada habisnya, sehingga banyak pihak menilai dan memberikan beragam pendapat, mengapa konflik ini tak kunjung usai.

Selain itu sepak terjang Amerika di kawasan Timur Tengah khususnya Palestina mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap konstelasi politik di kawasan ini. Cukup banyak alasan dan bukti yang bisa dibebankan bahwa Amerika Serikat mempunyai andil dalam keberlangsungan konflik antara Hamas dan Fatah hingga saat ini. Amerika dinilai selalu memicu konflik ini agar tetap memanas berkepanjangan demi beberapa kepentingan AS dan sekutunya..

Berbagai spekulasi tentang hal ini membuat penulis tertarik untuk mencoba meneliti tentang keterlibatan Amerika dalam konflik Hamas-Fatah

di Palestina. Sekaligus ingin memperdalam pengetahuan penulis sendiri tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat.

## **B. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Amerika menjalankan Politik Luar Negerinya di Timur Tengah khususnya Palestina.
2. Apa kepentingan Amerika dalam konflik antara Hamas dan Fatah di Palestina.
3. Bagaimana pengaruh kebijakan luar negeri Amerika terhadap Palestina.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Dengan berbagai alasan, kawasan Timur Tengah merupakan daerah yang penting bagi beberapa negara didunia untuk dikuasai. Tentu saja dengan adanya berbagai kepentingan politik tersebut Timur Tengah sering menjadi ajang pertempuran, serta terdapat berbagai konflik lainnya, baik yang bersifat intern maupun ekstern.

Konflik dikawasan Timur Tengah yang bersifat intern adalah konflik yang terjadi dikawasan itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari negara-

negara diluar kawasan itu sendiri. Misalnya konflik perebutan bangsa kurdi antara negara di Timur Tengah (Turki, Rusia, Suriah, Iran dan Irak), dan sengketa antara Saudi dan Mesir.

Selanjutnya konflik ekstern di Timur Tengah adalah konflik yang terjadi antara negara-negara di Timur Tengah dengan negara diluar kawasan itu, dimana setiap konflik ekstern terjadi pasti dipengaruhi oleh politik luar negeri, seperti kasus Amerika dan Irak dapat dijadikan contoh. Serta konflik ekstern lainnya yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri.<sup>1</sup>

Begitu juga dengan konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina. Konflik antara dua kubu yaitu Hamas dan Fatah pada awalnya merupakan konflik Intern. Akan tetapi kemudian karena campur tangan dunia Barat, yaitu Amerika dan sekutunya yang mempunyai kepentingan lain di Palestina memanfaatkan konflik ini sebagai strategi untuk mencapai tujuan politiknya. Dan memelihara konflik ini menjadi semakin memanas.

Konflik sesama saudara di Palestina sudah lama pecah. Ini bukan lagi sekadar bentrok kecil di jalanan antara milisi Fatah dengan Hamas, melainkan sudah berkobar menjadi perang. Dua wilayah yang menjadi

---

<sup>1</sup> Sidik Jatmika, *Politik Timur Tengah (bahan ajar perkuliahan)*, UMY, Yoyakarta 2004, hal 117-118.

otoritas Palestina (Tepi Barat dan Jalur Gaza) sudah berubah menjadi ajang bertukar peluru, mortir, dan roket di antara sesama pejuang Palestina.

Konflik Hamas-Fatah adalah konflik dalam negeri. Akan tetapi, ada campur tangan pihak luar yang mengambil keuntungan dalam konflik itu. Tetapi tetap saja, itu adalah konflik sesama warga negara Palestina. Idealnya, jika itu murni konflik internal, terlepas dari seberapa besar sumber daya yang mereka perebutkan, mereka akan sampai pada satu titik penyelesaian.

Berdasarkan teori struktural fungsional, konflik akan menjadi gangguan keseimbangan sebuah sistem sosial. Namun, sistem sosial itu juga akan mencari cara sendiri untuk mencapai keseimbangan baru. Bila dua orang anak berkelahi, tidak akan bermusuhan dalam jangka waktu yang lama. Mereka akan segera menemukan momentum untuk berdamai. Namun, jika ada orang lain yang selalu memanas-manasi, misalnya orang tua, bisa jadi hubungan kedua anak itu akan lebih sulit untuk diperbaiki.<sup>2</sup>

Konflik internal idealnya berada dalam tingkatan dialektika persatuan dari segi-segi yang bertentangan. Atau dengan kata lain, konflik yang masih bisa selesai dengan negosiasi. Ini sudah mereka coba satu tahun terakhir.

---

<sup>2</sup> *waspada online*, diakses pada 26 Desember 2007.

Jika saja tidak diisolasi dunia, problemnya tidak akan serumit ini. Persatuan dari segi-segi yang bertentangan masih cukup logis jika mereka tidak harus menghadapi tangan-tangan asing yang mengacak-acak pemerintahan melalui segala cara.

Pemilu yang dimenangkan secara mutlak oleh kelompok Hamas dan siap menjalankan pemerintahan Palestina tidak diinginkan oleh Amerika, karena jika pemerintahan Hamas berdiri akan menyulitkan Amerika. Dan Palestina akan semakin kuat. Karena itulah Amerika dan sekutunya berusaha keras menggagalkan pemerintahan Hamas dengan segala cara.

Amerika, Uni Eropa, dan Israel menggunakan dua cara dalam upaya menggagalkan pemerintahan Hamas. Pertama, mereka mengembargo bantuan ke Palestina. Embargo keuangan yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) dan Barat terbukti telah menyengsarakan ekonomi negeri itu.. Kedua, menggunakan Fatah sebagai kekuatan politik dan militer untuk menghancurkan legitimasi kemenangan Hamas dalam pemilu.

Sebenarnya, tanpa bantuan Barat sekalipun, Palestina di bawah kepemimpinan Hamas mampu menjalankan roda pemerintahan. Bantuan dari berbagai penjuru dunia sudah terkumpul, tetapi Amerika dan Israel menghadang setiap bantuan untuk Palestina, walaupun itu bukan dari

11

krisis keuangan Palestina di bawah Hamas. Barat merilis tuduhan bahwa Palestina di bawah Hamas adalah pemerintahan yang tidak sah, karena Hamas terdaftar (secara sepihak) sebagai kelompok teroris. Berdasarkan su'uzhon inilah Amerika dan Israel merasa berhak menghadang bantuan solidaritas kaum muslimin dunia. Inilah ironi demokratis paling parah di muka bumi.

Krisis dan kekacauanpun terjadi Palestina. Dalam posisi inilah kemudian Barat merilis dukungannya kepada Abbas (Fatah) dan menyalurkan bantuan jutaan dolar. Inilah kapak pembelah itu. Dengan dasar itulah kemudian ditawarkan pemerintahan koalisi yang merupakan kombinasi Fatah dan Hamas, di mana kemenangan telak Hamas ditelikung dengan mengakomodir Fatah.

Deklarasi Makkah yang berhasil mengombinasikan faksi berseteru itu, ternyata juga tidak bermakna banyak. Barat kemudian makin gencar mendukung Fatah dan makin kuat menekan Hamas, sampai Hamas frustrasi dan pecahlah perseteruan berdarah Fatah dan Hamas, yang sampai sekarang berkembang kian sengit.

Inilah luka menganga dalam internal bangsa Palestina yang diinisiasi



#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat ditarik suatu pokok permasalahan “Apa kepentingan Amerika Serikat terhadap konflik antara Hamas dan Fatah di Palestina?”

#### **E. Kerangka Berpikir**

Untuk menganalisa dan menjelaskan pokok permasalahan diatas dapat menggunakan teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy*) dan konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*).

Politik Luar Negeri menurut Jack. C Plano dan Roy Olton;

*“Foreign Policy is strategy or planned course of action developed by the decision makers of vis avis other states or international entities, aimed as achieving specific goals defined intern of international interest”<sup>4</sup>*

Dari penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa politik luar negeri suatu negara adalah strategi atau rangkaian kegiatan tindakan yang terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap entitas internasional yang

---

<sup>4</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *The international Dictionary*, Rienert an Wistone inc

ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi bagi kepentingan nasional.<sup>5</sup>

Politik luar negeri diartikan sebagai tindakan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya atau lebih tepatnya berdasarkan pada dinamika politik dalam negerinya. Dari pengertian diatas kita mempunyai sebuah konsep penting yaitu kepentingan nasional. Tentang konsep ini, Jack C. Plano dan Roy Olton dalam *International Relations Dictionary*, menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara adalah kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan, militer dan ekonomi.<sup>6</sup>

Sedangkan Kepentingan Nasional itu sendiri menurut Morgenthau didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian negara-bangsa.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *International Relations (Dinialia dan Metodologi)* 1 D3ES

Politik luar negeri, seperti halnya semua politik, adalah perjuangan memperoleh kekuasaan. Apapun tujuan akhir dari politik Internasional, tujuan menengahnya adalah kekuasaan. Negarawan-negarawan dan bangsa-bangsa mungkin mengejar tujuan akhir berupa kekuasaan, keamanan, kemakmuran atau kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin mendefinisikan tujuan-tujuan mereka itu dalam pengertian tujuan yang religius, filosofis, ekonomis atau sosial.

Mereka mungkin berharap bahwa bahwa tujuan ini akan terwujud melalui dinamika dalam tujuan itu sendiri, melalui takdir Tuhan, atau melalui perkembangan alamiah urusan kemanusiaan. Tetapi begiu mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan politik internasional, mereka melakukannya dengan berupaya memperoleh kekuasaan.<sup>8</sup>

Bukan tidak mungkin sebuah negara melakukan politik luar negeri dengan cara apa saja untuk mencapai kepentingan nasionalnya, bahkan dengan cara-cara yang dianggap jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan moralitas oleh berbagai aliran pemikiran politik yang ada. Penggunaan

---

<sup>8</sup> Hans J. Morgenthau, *Politik Among Nations* dikutip dalam Mohtar Masoe'd *Ilmu*

kekuasaan secara maksimal memungkinkan untuk sebuah negara mencapai tujuan politiknya yaitu kekuasaan.

Machiavelli berpendapat bahwa kekuasaan hendaknya tidak dikaitkan dengan agama dan moralitas, kecuali sejauh agama dan moral itu memiliki nilai utilitarianisme bagi kekuasaan dan negara. Machiavelli melihat kekuasaan sebagai tujuan itu sendiri. Menurut dia segala kebajikan, agama, moralitas harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan.<sup>9</sup>

Dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri, suatu negara senantiasa mendasarkan pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Menurut Donald E. Nuckertlein, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*. Gramedia. Jakarta 2001, hal 132-133.

Dalam konteks AS, kepentingan nasional yang dicapai AS dari waktu ke waktu adalah;<sup>11</sup>

1. Mempertahankan negara AS dan sistem konstitusionalnya.
2. Perluasan eksistensi ekonomi AS dan mempromosikan produk produknya ke luar negeri.
3. Menciptakan suatu tata dunia baru atau sistem keamanan internasional yang favorable.
4. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi AS dan sistem pasar bebasnya.

Namun dalam periode pasca perang dingin, pemerintah AS perlu menemukan komponen-komponen baru bagi kepentingan nasionalnya. Anthony Lake menggariskan tujuh aspek kepentingan nasional AS yaitu;<sup>12</sup>

1. Untuk mempertahankan AS, warga negaranya di dalam dan luar negeri serta para sekutunya, dari berbagai bentuk serangan langsung.

---

<sup>11</sup> Donald E. Nuchterlein, *American Recommitted: US National Interest in A Restructured World*, Kentucky: The University of Kentucky, 1991.

2. Untuk mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional.
3. Untuk mempertahankan kepentingan ekonomi AS.
4. Untuk menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi.
5. Mencegah proliferasi senjata nuklir.
6. Untuk menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap AS.
7. Memerangi kemiskinan, kelaparan dan pelanggaran terhadap HAM.

Untuk menjaga kepentingannya, AS senantiasa melakukan tiga hal yakni *pertama*, AS tetap menjaga posisinya sebagai kekuatan utama dalam ekonomi global, meskipun ia harus menghadapi kekuatan ekonomi Jepang, *kedua* AS akan menentang munculnya kekuatan hegemoni politik-militer di Eropa dan *ketiga* negara itu akan melindungi kepentingannya di negara-negara ketiga.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Samuel Huntington, "America's Changing Strategic Interest", Richard K Betts, *Conflict After The Cold War, Argument on Causes of War and Peace*, New York: Macmillan Publishing Company, 1994.

Semua kepentingan dasar diatas memiliki peranan penting, namun dalam prakteknya setiap negara harus menentukan dan memilih kepentingan mendasar tertentu untuk didahulukan daripada lainnya.<sup>14</sup> Berdasarkan strategi wilayah AS, ada tiga wilayah yang mendapatkan prioritas tinggi yakni wilayah Eropa, Asia Timur-Pasifik, Timur Tengah dan Asia Barat, baru kemudian Amerika Latin dan Afrika.

Bagi kepentingan AS, kawasan Timur Tengah sebagai prioritas ketiga karena selain wilayah itu menguasai lalu lintas laut dan udara Eropa-Asia Pasifik-Afrika, wilayah ini juga merupakan sumber utama energi bagi negara-negara sekutunya di Eropa Barat dan Asia Timur (Jepang). Sengketa Arab-Israel yang berkepanjangan, invasi Soviet ke Afghanistan, perang Iran-Irak, invasi Irak ke Kuwait, dan hubungan Soviet dengan Libya, Irak, PLO selama perang dingin.

Dalam menghadapi masalah konflik Israel-Palestina dan masalah Timur Tengah pada umumnya, ada dua aliran pemikiran yang di kalangan intelektual dan politisi AS yakni, 1. Kelompok yang membela doktrin 'Israel First', 2. Kelompok 'evenhanded' yang menginginkan AS 'lebih

---

<sup>14</sup> David W. Clinton, "*The National Interest: Normative Foundation*", *Review of Politics*, Vol.48, 1986, hal 499.

adil' bersikap di Timur Tengah.<sup>15</sup> Dari dua kelompok tersebut, ternyata 'Israel First' lebih dominan karena dianut oleh orang-orang yang duduk dalam posisi strategis di pemerintahan. Kelompok ini menginginkan dukungan Washington terhadap posisi dominan Israel di kawasan tersebut guna menjamin kepentingan AS di Timur Tengah.

Di mata AS, Israel adalah sebuah asset strategis yang secara dasar-dasar moral harus didukung penuh karena Israel adalah penganut demokrasi sekuler dengan gaya hidup Barat. Israel juga diibaratkan tempat perlindungan dan 'pengganti kerugian' bagi bangsa Yahudi yang telah mengalami 'penderitaan historis' pada masa Nazi.

Di kawasan Timur Tengah, maka kepentingan nasional AS adalah sebagai berikut; menjaga kelangsungan impor minyak dari Timur Tengah, terutama dari negara-negara Teluk, menjaga eksistensi Israel. Hal ini penting mengingat Israel adalah kawan dekat AS di Timur Tengah yang dapat dijadikan kepanjangan tangan AS di kawasan tersebut, untuk memperlancar dua kepentingan diatas, AS perlu menjaga stabilitas politik dan keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Maka AS menciptakan ketergantungan terhadap beberapa negara, mencegah rezim yang cenderung

---

<sup>15</sup> Michael Hudson, "United States Policy in Middle East: Opportunity and Dangers", *Current History*, 1986

radikal untuk berkuasa dengan jalan mendukung kelompok minoritas yang menentang penguasa untuk berontak, mempersenjatai negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi guna mencegah timbulnya dominasi politik maupun militer, menjadikan kawasan tersebut sebagai pangsa pasar industri senjata.<sup>16</sup>

#### **F. Hipotesa**

Kepentingan Nasional Amerika dalam keterlibatannya pada konflik Hamas-Fatah adalah menjaga eksistensi Israel karena bagi Amerika Serikat, Israel adalah satu-satunya sekutu strategis di kawasan Timur Tengah. Dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya baik dalam hal ekonomi, politik maupun ideologi.

---

<sup>16</sup> Sidik Jatmika, "PLN AS di Timur Tengah", *Hand Out mata kuliah Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, Fisipol UMY, 1996, hal. 3.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk memfokuskan dan memperjelas tujuan penelitian ini maka penulis memberikan batasan penelitian ini dimulai sejak kelompok Hamas berkuasa di Palestina pasca pemilu tahun 2006.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kajian Literatur dan Pustaka serta penggunaan data sekunder yang diperoleh dari Makalah, Diktat, Jurnal, Ensiklopedi, Media Massa baik cetak maupun elektronik, Internet, serta sumber pendukung lainnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I.** Bab ini berisi Pendahuluan yaitu: Alasan pemilihan judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Berfikir, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan.

**BAB II.** Bab ini berisi tentang konflik antara kelompok Hamas dan

BAB III. Bab ini akan membahas mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Hamas-Fatah.

BAB IV. Bab ini akan membahas kepentingan nasional Amerika terhadap konflik Hamas Fatah di Palestina